

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN
ASAHAN NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS BAGIAN HUBUNGAN
MASYARAKAT DALAM RANGKA PENYEBARAN
INFORMASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DI KABUPATEN ASAHAN**

TESIS



Oleh :

ERWIS EDI PAUJA

NPM. 031801015

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2006**

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN
ASAHAN NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS BAGIAN HUBUNGAN
MASYARAKAT DALAM RANGKA PENYEBARAN
INFORMASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DI KABUPATEN ASAHAN**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP)
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh

ERWIS EDI PAUJA

NPM. 031801015

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

M E D A N

2006

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN
ASAHAN NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PENYEBARAN INFORMASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH DI KABUPATEN ASAHAN

N a m a : Erwis Edi Pauja

N I M : 031801015

Menyetujui

Pembimbing I



Drs. Miftahuddin, MBA

Pembimbing II



Drs. Kariono, MA

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Drs. Kariono, MA

Direktur



Drs. Heri Kusmanto, MA

Telah diuji pada Tanggal 05 Mei 2005



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Drs. Usman Tarigan, MS
Sekretaris : Ir. Erwin Pane, MS
Pembimbing I : Drs. Miftahuddin, MBA
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA
Penguji Tamu : Drs. Heri Kusmanto, MA

A B S T R A K

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ASAHAN NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENYEBARAN INFORMASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN ASAHAN

N a m a : Erwis Edi Pauja
N I M : 031801015
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Drs. Karlono, MA
Pembimbing II : Drs. Miftahuddin, MA

Surat keputusan Bupati Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2003 tentang perubahan pertama atas keputusan Bupati Kabupaten Asahan Nomor 04-ORG/2001 tentang uraian tugas jabatan struktural dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan dalam Pasal 13 mengenai uraian tugas bagian Hubungan Masyarakat. Dalam Surat keputusan Bupati Kabupaten Asahan ini setiap bagian mempunyai tugas yang cukup vital untuk mendukung implementasi dari Otonomi Daerah. Dengan demikian jelas posisi bagian Hubungan Masyarakat tersebut dalam pelaksanaan tugas-tugasnya mendukung implementasi dari Otonomi Daerah itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Keputusan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Tugas Bagian Hubungan Masyarakat Dalam Rangka Penyebaran Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Asahan. Sampel diambil secara *total sampling*, sebanyak 21 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif guna mengetahui bagaimana Implementasi Keputusan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Tugas Bagian Hubungan Masyarakat Dalam Rangka Penyebaran Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Asahan dengan menggunakan metode skoring, yang dibagi atas tiga kriteria, yaitu : implementasi kebijakan baik, sedang dan rendah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari keempat indikator yang digunakan untuk mengukur Implementasi Keputusan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Tugas Bagian Hubungan Masyarakat Dalam Rangka Penyebaran Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Asahan, diukur dari empat indikator yaitu : organisasi, sumber-sumber, struktur birokrasi dan penerapan. Dari keempat indikator tersebut secara umum Implementasi Keputusan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Tugas Bagian Hubungan Masyarakat Dalam Rangka Penyebaran Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Asahan sesuai dengan kriteria yang ditentukan dengan skor rata-rata adalah 2.60, maka tergolong baik. Namun apabila dilihat dari masing-masing indikator, menunjukkan adanya perbedaan untuk masing-masing indikator tersebut. Dari keempat indikator hanya terdapat satu indikator yang termasuk dalam kategori sedang, yaitu sumber-sumber sedangkan tiga indikator lainnya yaitu organisasi, struktur birokrasi dan penerapan termasuk dalam kategori baik.

Key words : implementasi kebijakan, hubungan masyarakat, .

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Adapun judul Tesis ini adalah “Implementasi Keputusan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Tugas Bagian Hubungan Masyarakat Dalam Rangka Penyebaran Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Asahan”.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik yang secara langsung membimbing penulisan tesis ini maupun secara tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H. M. Yacob Matondang, Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Drs. Heri Kumanto, MA, Direktur PPs Universitas Medan Area
3. Bapak Drs. Kariono, MA, Ketua Program Studi Magister Admistrasi Publik, sekaligus sebagai pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis.
4. Bapak Drs. Miftahuddin, MA, sebagai pembimbing II, yang telah banyak memberikan masukan berarti dalam penyelesaian tesis.
5. Bapak Bupati Kabupaten Asahan, atas izn belajar dan bantuan yang diberikan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan ke IV (2003) Program Studi Magister Admistrasi Publik

8. Pegawai dan staf administrasi Program Studi Magister Administrasi Publik PPS Universitas Medan Area atas segala pelayanan yang diberikan selama penulis mengikuti perkuliahan.

Terimakasih pula kepada kedua orang tua, istri dan anak-anaku, serta keluarga, yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat serta do'a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Semoga amal sholeh mereka semua mendapat taufik dan rahmat Allah Subhanahu wataala, Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, April 2006

P e n u l i s

Erwis Edi Pauja

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kebijakan Publik	12
2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik.....	12
2.1.2. Proses Analisis Kebijakan Publik	18
2.1.3. Implementasi Kebijakan	28
2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Otonomi Daerah	41
2.3. Hubungan Masyarakat	49
2.4. Sistem Komunikasi Pemerintahan Indonesia	59
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Bentuk Penelitian	63
3.2. Lokasi Penelitian	63
3.3. Populasi dan Sampel	63
3.4. Variabel Penelitian yang Diamati.....	64
3.5. Teknik Analisa Data	65

BAB IV : GAMBARAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

4.1. Sejarah Singkat Asahan	66
4.2. Geografi	74
4.2.1. Letak dan Keadaan Geografi	74
4.2.2. Iklim	74
4.2.3. Pertanian	75
4.3. Pemerintahan	77
4.3.1. Wilayah Administrasi	77
4.3.2. DPRD	77
4.3.3. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	77
4.4. Penduduk dan Tenaga Kerja	79
4.4.1. Jumlah Penduduk	79
4.4.2. Tenaga Kerja	80
4.5. Sosial	82
4.5.1. Pendidikan	82
4.5.2. Kesehatan dan Keluarga Berencana	83
4.5.3. Agama	84

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

5.1. Hasil Penelitian	86
5.1.1. Karakteristik Responden	86
5.1.2. Variabel Penelitian	88
5.2. Analisis Data	100

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan 104

6.2. Saran - Saran 105

DAFTAR PUSTAKA..... 107

L A M P I R A N.....

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Letak dan Geografi Kabupaten Asahan.....	76
4.2	Jumlah Desa dan Kelurahan Tiap Kecamatan tahun 2004.....	78
4.3	Luas Wilayah, Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan, 2004...	81
4.4	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Menurut Jenjang Sekolah dan Kecamatan 2004.....	85
5.1	Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin.....	86
5.2	Distribusi Responden Menurut Umur.....	87
5.3	Distribusi Responden Menurut Pendidikan.....	88
5.4	Pendapat Responden Tentang Adanya Struktur Organisasi dalam Implementasi Kebijakan.....	89
5.5	Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Adanya Kebijakan Tentang Pembentukan BAKOHUMAS Kabupaten Asahan.....	90
5.6	Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Tujuan Kebijakan Keputusan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2003.....	91
5.7	Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Adanya Perangkat Aturan dalam Kebijakan.....	92
5.8	Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Adanya Otoritas atau Wewenang dalam Pelaksanaan Kebijakan	93
5.9	Pendapat Responden Tentang Keterpaduan Komponen Pelaksana Dalam Pelaksanaan Kebijakan.....	94
5.10	Pendapat Responden Keahlian dan ketrampilan komponen Pelaksana dalam Kebijakan Keputusan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2003.....	95

5.11	Pendapat Responden Pelaksanaan Kebijakan telah sesuai dengan Peraturan yang ada.....	97
5.12	Pendapat Responden Pelaksanaan Kebijakan Keputusan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2003 telah sesuai dengan Petunjuk Pelaksana.....	98
5.13	Pendapat Responden Tentang Pelaksanaan Kebijakan Keputusan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2003.....	99
5.14	Rata-rata Skor Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2003.....	101

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu pendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah perkembangan keadaan, baik didalam negeri yang diwarnai oleh tuntutan untuk mengadakan reformasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maupun pengaruh globalisasi yang diwarnai oleh perubahan dan perkembangan yang pesat diberbagai bidang khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Umumnya disepakati bahwa Hubungan Masyarakat itu merupakan aktivitas fisik dan fikir yang sangat dinamis bahkan sering timeless (disamping melaksanakan pedoman dan standar dari job discription yang ada, Hubungan Masyarakat paling sering melaksanakan pekerjaan dalam materi permasalahan yang berbeda-beda dan cukup rumit serta datangnya tiba-tiba yang harus diselesaikan tuntas dan cepat tanpa mengenal waktu). Sehingga memang kelembagaan ini betul-betul membutuhkan SDM berkompentensi dan profesionalitas, disiplin dan ber-etos kerja tinggi; loyal, konsekuen dan konsisten; ikhlas mengabdikan, tentunya disertai pula dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung.

Dinamika itu dalam wujud pentahapan secara simultan, mulai dari upaya sedini dan sedalam mungkin mengetahui banyak hal, pengenalan

fakta-fakta dari data yang ada, kemudian secara sistematis dilakukan suatu perencanaan informasi dan komunikasi, selanjutnya dikemas untuk dikomunikasikan, serta kemudian dianalisis dan evaluasi dari feed back yang ada, terus-menerus seperti sebuah siklus.

Suatu siklus yang dampaknya memintarkan, memajukan, serta mencitra baikkkan personalia dan institusi. Karena itu, disepakati sesungguhnya setiap aparatur negara mulai dari pimpinan sampai jabatan staf, harus pula mempunyai sifat-sifat kehumasan yang baik. Institusi Humas (Hubungan Masyarakat) dekat dengan top manager dan bahkan harus mampu selangkah didepan pimpinan dalam informasi banyak hal. Selangkah ke depan berarti boleh berjalan didepan tetapi tidak menghalangi, boleh berjalan disamping tetapi tidak menjegal dan boleh berjalan dibelakang tetapi tidak memberati.

Disamping itu karakter kerja Humas selalu menyatu dan melalui/lintasi struktural dan fungsional kepemimpinan pemerintahan. Dengan demikian, secara moral dan fungsional mereka bertanggung jawab pula pada kelancaran, mutu dan kecepatan kerja Humas alasan ini menjadi lebih kuat, oleh karena berdasarkan kaidah ilmiah dan emtiris, hubungan kerja Humas sebagian melekat dengan tugas dan fungsi top manager (Bupati/Walikota) yang harus dilakukan secara proaktif, berkapasitas tinggi dengan hasil maksimal dan pandai berdiplomasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E, 1976, *Public Policy Making*, New York, Holt Rinechart and Winston.
- Dye, Thomas R., 1995, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.
- Dunn, William N, 1994, *Public Policy Analysis; An Introduction*, Englewood Clifs, New Jersey, Prentice-Hall Inc, Indonesian Edition: Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 1998, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Edward III, 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarter Press.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, *Otonomi Daerah : Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2000.
- Edward III, 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarter Press.
- Gibson, James L. *Organisasi dan Manajemen*, Penerbit Erlangga. Jakarta. 1990
- Gibson, James L. *Organisasi dan Manajemen*, Penerbit Erlangga. Jakarta. 1990
- Grindle, Merilee S., (ed), 1980, *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, new jersey: Princetown University Press.
- Handayaniingrat, Soewarno, 1993. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: GunungAgung.
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika..
- Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartasasmita, Ginanjar (1995) *Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Sebuah Tinjauan Mengenai Lingkungan Kebijaksanaan (Policy Environment)*, LAN bekerjasama dengan UNPAD, Bandung.
- Kristiadi, J.B, 1997. *Perspektif Administrasi Publik Menghadapi Tantangan Abad 21*, UNPAD, Bandung.
- Mazmanian, Daniel A. and Paul A. Sabatier. 1981. *Effective Policy Implementation*. Toronto: D.C. Heath.
- Manila, I GK, 1996. *Praktek Manajemn Pemerintahan Dalam Negeri*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, *"The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework"* dalam *Administration and Society* 6, 1975, London: Sage.
- Mustopadidjaja, AR, 1992, *Studi Kebijaksanaan: Perkembangan dan Penerapannya Dalam Rangka Administrasi dan Pembangunan*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Nugroho D, Riant, 2006. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Osborne, David, dan Ted Gaebler, 1993, *Reinventing Government: How the Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, New York: Plume Book.
- Republk Indonesia, 2004. *Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : CV. Tamita Utama.
- Sarundajang, 2001. *Arus Balik Pusat Kekuasaan Dari Pusat ke Daerah*, Jakarta, Sinar Harapan.
- Sugiyono, 1998. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.
- Setyawati, Endah, 2004. "Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi". *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol. IV No. 1, September 2003.
- Setiyani, Helis & M. Irfan Islami, 2004. "Analisis Implementasi Kebijakan". *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol. IV No. 1, September 2003.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2002. *Kebijakan Publik Yang Membumi : Konsep, Strategi & Kasus*. Yogyakarta : Kerjasama YPAPI dengan Lukman Ofset.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *"Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan"*, Jakarta, 20 Juni 2000, kertas kerja.
- Toha, Miftah, 1991 , *Perspektif Perilaku Birokrasi*, Jakarta: Rajawali.
- Turner, Mark, dan David Hulme, 1997, *Governance, Administration, and Development*, London: MacMillan Press, 1997.
- Wahab, Solichin Abdul, 2002, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibawa, Samudra, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.